

**PERANAN AKTIFITAS PEMUDA
DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM
NON FORMAL DI DESA TROPODO KECAMATAN WARU
KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:

Jamilatul Lu'lu'atul Maknunah

D01205152



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh:


Nama : JAMILATUL LU'LU'ATUL MAKNUNAH

NIM : D01205152

Judul : PERANAN AKTIVITAS PEMUDA DALAM
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM NON FORMAL
DIDESA TROPODO KECAMATAN WARU KABUPATEN
SIDOARJO

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 13 Agustus 2009
Pembimbing


Drs. Ali Mas'ud M. Ag
196301231993031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh **Jamilatul Lu'lu'atul Maknunah** ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi:


Surabaya, 09 September 2009
Mengesahkan Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,


Dr. H. Nur Hamim, M.Ag
1962031219910311002

Ketua,


Drs. Ali Mas'ud, M.Ag
196301231993031002

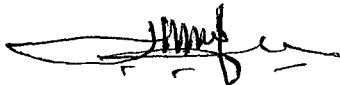
Sekretaris,


Dra. Siti Nur Ilmah
195707031981032001

Penguji I


Drs. H. Anwar Rasjid, M.Ag
194908101976111001

Penguji II


Drs. Nadlir M.Pd.I
196807221996031002

di pendidikan formal saja, tetapi juga di pendidikan non formal. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (10) Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; ayat (11) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; ayat (12) Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang; ayat (13) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Berdasarkan pada pernyataan tersebut, maka pendidikan non formal merupakan salah satu jalur dari penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan non formal dalam perususan penyelenggaraannya memiliki suatu sistem yang terlembagakan, yang di dalamnya terkandung makna bahwa setiap pengembangan pendidikan non formal perlu perencanaan program yang matang, melalui kurikulum, isi program, sarana prasarana, sasaran didik, sumber belajar serta faktor-faktor yang satu sama lain tak dapat dipisahkan dalam pendidikan non formal.

5. Peranan Pendidikan Non Formal Di Masyarakat

Pentingnya peranan pendidikan non formal di masyarakat bias di analisis dari jenis kebutuhan belajar beragam, hal ini sejalan dengan

- b. Program pendidikan lanjutan, yang memberikan pelayanan pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti pendidikan peningkatan produktivitas tinggi.

Pada sasaran pengembangan kelompok pertama pendidikan non formal memiliki peranan mendasar dalam rangka membangun kemampuan dasar masyarakat (sasaran pendidikan), terutama dalam implementasi sepanjang hayat. Maka pendidikan non formal memiliki tugas khusus bukan hanya sekedar tuntunan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun tetapi yang lebih penting mencerdaskan masyarakat pada level literasi (Pembebasan buta huruf) berarti membuka wawasan dan cakrawala masyarakat ke arah kemajuan dan perubahan hidup dan kehidupan yang lebih baru. Program pendidikan dasar melalui pendidikan non formal jangan hanya dikategorikan sekedar menyelesaikan masalah tingginya angka *drop out* pendidikan dasar dan menjadi sorotan dunia internasional yang berpengaruh terhadap HDI (*Human Development Index*), akan tetapi tugas ini harus dianggap suatu kewajiban dalam menata *lifelong education* pada tingkatan awal.

6. Perbedaan Pendidikan Formal Dan Pendidikan Non Formal

Secara definitif pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya, termasuk ke dalam kegiatan yang berorientasi akademis yang umum, program spesialisasi dan latihan

masyarakat yang sedang membangun. Apabila dengan bertambahnya usia, kepemimpinan menjadi lebih arif karena bertambahnya pengalaman, namun hal itu bisa dibarengi dengan berkurangnya dinamika. Barangkali itu adalah *trade off*-nya. Pada lapisan pemimpin-pemimpin muda itulah kita harapkan memperoleh sumber dinamika. Sumber dinamika yang dapat mengembangkan kreativitas, melahirkan gagasan baru, mendobrak hambatan-hambatan, mencari pemecahan masalah, kalau perlu dengan menembus sekat-sekat berpikir konvensional.

Oleh karena itu, menjadi tugas kita sekarang, terutama tugas dari para pemimpin pemuda untuk membangun semangat, kemampuan, dan pengamalan kepeloporan dan kepemimpinan. Membangun semangat adalah membangun sikap, karena itu terkait erat dengan pembangunan budaya. Pendidikan merupakan wahana yang paling penting dan mendasar, di samping upaya lain untuk merangsang inisiatif dan membangkitkan motivasi. Keteladanan adalah pendekatan lain untuk membangkitkan semangat. Dorongan masyarakat, atau tantangan dari masyarakat, juga merangsang bangkitnya semangat.

Membangun kemampuan juga penting, karena kepeloporan dan kepemimpinan tidak cukup hanya dengan kata-kata. Harus ada perbuatan. Seorang pemimpin harus dapat menunjukkan kepada yang dipimpin, atau seorang pelopor kepada yang dipelopori, apa yang harus dilakukan.

Oleh karena itu, profesionalisme atau pengetahuan mengenai suatu bidang tertentu yang relevan dengan kepeloporan dan kepemimpinannya amat diperlukan. Tidak berarti harus menguasai lebih teknis dari yang

atau bahkan dirombak total. Dari sebab itu dalam tulisan ini redaksi berusaha sedikit mengurai mengenai beberapa hal terkait dengan kondisi pendidikan di Indonesia.

Selama kurun tahun 2006 pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah kebijakan BOS (bantuan Operasional Sekolah) dan penerapan standar kelulusan UN sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut mampu menjadi solusi bagi kemajuan pendidikan di Indonesia? Karena pada tataran realitas, selama ini nasib pendidikan di Indonesia kalau tidak dikatakan mundur berarti masih tetap berjalan di tempat.

Ada dua hal mungkin yang bisa menjadi sorotan terkait kurang optimalnya pemerintah dalam membenahi sistem pendidikan nasional di Indonesia. Yang pertama, adalah harus adanya penerapan kebijakan yang berbasiskan pada realitas pendidikan. Penerapan kebijakan yang berbasiskan realitas merupakan suatu hal yang wajib menjadi landasan dalam setiap kebijakan pendidikan. Karena realitas mampu menampilkan kondisi pendidikan yang sesungguhnya.

Basis realitas pendidikan yang dimaksud adalah basis realitas pendidikan yang diambil secara komprehensif (menyeluruh) dan objektif yang terdapat pada seluruh daerah di Indonesia. Faktor komprehensifitas dan objektifitas ini menjadi prinsip utama dalam penerapan kebijakan yang berbasiskan realitas, karena dari kedua prinsip ini gambaran realitas

pendidikan di Indonesia tidak akan menjadi abu-abu dan sempit. Dari sinilah kemudian kebijakan-kebijakan baru bisa diterapkan.

Kemudian yang kedua, adalah peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan kontrolling terkait dengan penerapan kebijakan-kebijakan pendidikannya. Peran pemerintah dalam melakukan pengawasan kebijakannya tersebut menempati posisi yang sangat urgen pada tataran keberhasilan penerapan kebijakannya tersebut. Selama ini, hal yang paling rapuh dan lemah dalam usaha memajukan pendidikan di Indonesia adalah tidak adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat terkait dengan kebijakan-kebijakannya. Hal tersebut kemudian bisa melahirkan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan para oknum di daerah-daerah yang merasa leluasa tanpa adanya pengawasan dari pusat.

Suatu contoh adalah dengan adanya kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selama setahun terakhir ini menjadi sorotan berbagai kalangan pemerhati pendidikan di Indonesia. Pidato Presiden SBY pada Rapat Paripurna DPR Agustus 2006 yang menyatakan bahwa pemerintah telah mendistribusikan BOS ke 29,4 Juta murid SD dan 10,5 Juta murid SMP, pada perspektif pemerintah pusat hal itu mungkin merupakan suatu terobosan yang spektakuler dan menjadi parameter bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Namun, bagi sebagian kalangan pemerhati pendidikan hal tersebut hanya merupakan setitik kemajuan yang hanya dapat dilihat dari segi jumlah atau kuantitas umum saja. Karen pada tataran praksis di lapangannya distribusi dana BOS yang disampaikan Presiden SBY tersebut belum mampu secara utuh meringankan beban biaya pendidikan masyarakat. Karena lagi-lagi hal yang substansialnya meringankan beban biaya pendidikan tersebut, justru oleh

beberapa kelompok oknum di daerah-daerah dimanfaatkan sebagai lahan baru bagi praktek-praktek korupsi dan rekayasa untuk melahirkan biaya-biaya baru yang diperuntukkan kepada murid di luar biaya BOS.

Jadi, pada satu sisi ada upaya pemerintah meringankan beban biaya pendidikan masyarakat dan pada sisi lainnya ada upaya beberapa oknum untuk menciptakan tarikan beban biaya baru di luar BOS yang harus ditanggung oleh masyarakat. Ketumpangtindihan dan rekayasa model baru inilah yang terjadi pada masyarakat kita. Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya pengawasan pemerintah pusat dalam mengawal kebijakan-kebijakannya, yang akhirnya mengakibatkan masyarakat menjadi korban beban biaya pendidikan terus-menerus.

Sebagai sebuah upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, sejak tahun ajaran 2002/2003 pemerintah menggalakkan kebijakan UAN (Ujian Akhir Nasional) sebagai standarisasi nilai kelulusan secara nasional. Kebijakan ini sejak digulirkan hingga kini menjadi polemik tersendiri bagi kalangan pemerhati pendidikan di Indonesia, bahkan bagi pihak kementerian pendidikan nasional sendiri pun harus disibukkan dengan kebijakannya ini.

Pokok permasalahan dalam kebijakan UAN adalah pada tahap standarisasi nilai kelulusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Semenjak pertama UAN digulirkan standard nilai yang diterapkan oleh pemerintah adalah 3,01. Kemudian, pasca UAN diganti dengan UN (Ujian Nasional) standar nilai kelulusan semakin meningkat dengan nilai 4.01 (2004/2005), kemudian meningkat lagi pada tahun berikutnya menjadi 4,26 (2005/2006).

Standar nilai kelulusan ini ditetapkan dan disesuaikan dengan target yang diidealkan pemerintah. Pemerintah berharap bahwa dengan penerapan sistem standar nilai kelulusan ini, pemerintah dapat mengangkat mutu pendidikan di Indonesia. Hal tersebut kemudian menjadi sangat kontradiktif dengan apa yang ada pada pandangan pemerhati pendidikan di Indonesia atau bahkan dalam kaca mata masyarakat itu sendiri. Bagi para pemerhati pendidikan, UN merupakan kesalahan interpretasi pemerintah dalam memahami evaluasi dari standard pendidikan nasional.

Seperti apa yang disampaikan oleh Deni Hadiana (Perekayasa Pendidikan Litbang Diknas), bahwa ada dua hal yang harus diperhatikan pemerintah terkait dengan UN. Pertama, kesalahpahaman interpretasi terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas). Dan yang kedua, adalah UN belum mampu mencerminkan keadilan bagi peserta didik, hal tersebut bisa dilihat dari masih tingginya disparitas mutu pendidikan antar satu sekolah dengan sekolah lainnya, yang kemudian bisa melahirkan persaingan yang tidak sehat antar sekolah atau bahkan pihak sekolah akan melakukan kecurangan-kecurangan demi mencapai target standar kelulusan UN.

Di samping itu, pada wilayah masyarakat dan pelaku pendidikan, standar UN seakan-akan menjadi “momok” yang menakutkan. Banyak orang tua siswa dan pelaku pendidikan yang menjadi gelisah setiap menjelang UN. Bahkan beberapa siswa harus mengalami shocktrauma dalam menghadapi UN.

Dari uraian tersebut, mungkin terdapat beberapa hal yang memang harus disikapi baik oleh pemerintah, pengamat pendidikan, sekolah dan para

Karang Taruna harus memiliki sarana prasarana yang memadai baik secara tertulis maupun administrasi Keberadaan Karang Taruna harus mampu menunjukkan peran dan fungsinya secara optimal di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat memberikan legitimasi dan kepercayaan kepada komponen-komponen yang lain yang sama-sama berpartisipasi dalam Pembangunan Desa / Kelurahan khususnya pembangunan dalam pembangunan dalam bidang Kesejahteraan Sosial, salah satu komponen yang berperan dalam pembangunan Desa / Kelurahan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

LPM bersama-sama dengan komponen yang lain sesuai dengan tugas, fungsi dan perannya berkepentingan membangun Desa / Kelurahan masing-masing. Mengetahui bahwa LPM sebagai lembaga masyarakat yang mewadahi segenap aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa / Kelurahan secara menyeluruh (Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Pertahanan dan Keamanan) dan mempunyai tugas yang menyelenggarakan musyawarah Desa / Kelurahan maka Karang Taruna sebagai salah satu bagian dari partisipasi pembangunan bidang kesejahteraan sosial akan selalu koordinasi, konsultasi, koreksi dan memberikan kritik / saran maupun bentuk yang lain dengan LPM.

Pemberdayaan Karang Taruna dengan program LPM dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Telah di ketahui bersama bahwa Karang Taruna sebagai organisasi sosial kepemudaan yang ada di Desa / Kelurahan mempunyai tugas pokok yaitu : bersama-sama pemerintah menangani permasalahan sosial (Pembangunan dibidang Kesejahteraan Sosial). Sebagai organisasi Karang Taruna mempunyai program yang

disesuaikan dengan kepentingan / keadaan masyarakat Desa / Kelurahan masing-masing.

Dalam program / kegiatan yang dilaksanakan LPM dan setelah dicermati, dikaji dan dipahami maka dapat ditarik suatu garis kerjasama koordinasi, saling mengisi, saling mendukung dan saling sumbang saran dengan program / kegiatan Karang Taruna sebagai bagian dari partisipasi masyarakat khususnya generasi muda, bidang Usaha Kesejahteraan Sosial, program-programnya akan dilaksanakan bersama-sama membahu pemerintah dalam pembangunan di Desa / Kelurahan meskipun Karang Taruna kosentrasinya pada Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial..

Sesuai dengan kondisi masing masing Karang Tarunanya. Karang Taruna diharapkan mampu menyikapi dan menangani berbagai permasalahan kesejahteraan sosial para pemuda dan warga masyarakat umumnya, LPM sebagai wahana partisipasi masyarakat (salah satunya Karang Taruna) akan selalu memberikan spirit, dorongan dan membantu pembangunan Karang Taruna melalui program-program yang telah direncanakan Karang Taruna. Karang Taruna yang telah siap dengan program-programnya dan telah dikoordinasikan disinkronkan dengan LPM akan segera memberikan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai yang diharapkan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bali (Pemerintah Provinsi Bali) mengingat Karang Taruna sebagai ujung tombaknya dan berarti pula Karang Taruna mengisi kegiatan LPM.

Dengan bekal kemampuan dan kemapanan yang optimal, Karang Taruna akan mampu secara maksimal menangani permasalahan kesejahteraan sosial, sehingga permasalahan sosial yang ada di Desa / Kelurahan akan menjadi berkurang / hilang.

Jenis organisasi apabila ditinjau dari segi wewenang, tanggungjawab maupun hubungan kerjanya dapat dibedakan dalam berbagai macam. Pemilihan jenis organisasi akan memberi pengaruh terhadap sistem kerja Pengurus dalam menjalankan aktivitasnya. Yang perlu dipertimbangkan adalah kemampuannya dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Untuk organisasi Remaja Masjid sebaiknya dipilih jenis organisasi lini-staf. Yang merupakan perpaduan (kombinasi) antara organisasi lini dan staf. Dengan menerapkan jenis organisasi ini, insya Allah, akan diperoleh beberapa keuntungan, antara lain:

- a. Adanya pembagian kerja yang jelas dari masing-masing personil Pengurus, baik sebagai pimpinan, staf maupun pelaksana.
- b. Upaya kaderisasi dapat berlangsung dengan baik, karena adanya kesempatan bagi para Pengurus untuk mengembangkan diri.
- c. Menumbuhkan suasana kerjasama yang baik di antara Pengurus.
- d. Prinsip penempatan ahlinya pada bidangnya atau the right man on the right place dapat lebih mudah dilakukan.

merupakan gambar struktur organisasi Remaja Masjid yang menunjukkan posisi, hirarki, rentang kendali dan lain sebagainya. Bagan organisasi biasanya berbentuk kotak-kotak kedudukan yang dihubungkan oleh garis-garis wewenang, baik instruksional ataupun koordinatif. Adapun manfaat yang dapat diperoleh Remaja Masjid dengan menggunakan bagan organisasi adalah:

- 1) Dapat diketahui besar-kecilnya organisasi Remaja Masjid.
- 2) Mudah diketahui garis-garis saluran wewenang dan tanggung jawab pengurus.
- 3) Bisa diketahui masing-masing bidang kerja dan jabatan Pengurus yang ada.
- 4) Bisa untuk mengetahui perincian aktivitas satuan organisasi maupun tugas setiap Pengurus.
- 5) Dapat untuk mengetahui nama, foto dan kedudukan masing-masing Pengurus.
- 6) Dapat untuk menilai apakah suatu Remaja Masjid telah menerapkan prinsip-prinsip organisasi dengan baik atau belum.

Remaja Masjid yang maju, modern dan memiliki kegiatan beraneka ragam serta mampu meningkatkan ketaqwaan anggotanya adalah merupakan organisasi kemasjidan yang sangat diharapkan. Namun, untuk mencapai hal tersebut butuh waktu dan perjuangan yang panjang. Ada tiga fase dalam tahap perkembangan organisasi ini, yaitu: fase penumbuhan, pembinaan dan pengembangan organisasi. Untuk menuju organisasi Remaja Masjid yang maju diperlukan kerja keras dan kinerja yang profesional para Pengurusnya.

Remaja Masjid yang maju, modern dan memiliki kegiatan beraneka ragam serta mampu meningkatkan ketaqwaan anggotanya adalah merupakan organisasi

kemasjidan yang sangat diharapkan. Namun, untuk mencapai hal tersebut butuh waktu dan perjuangan yang panjang. Ada tiga fase dalam tahap perkembangan organisasi ini, yaitu: fase penumbuhan, pembinaan dan pengembangan organisasi. Untuk menuju organisasi Remaja Masjid yang maju diperlukan kerja keras dan kinerja yang profesional para Pengurusnya.

Organisasi dan management bagaikan tubuh dengan jiwanya. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena di dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang bersifat statis harus digerakkan oleh sesuatu yang dinamis yang disebut dengan management. Management adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling) dengan memanfaatkan ilmu dan seni dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Planning adalah proses pemikiran dan pengaturan yang matang untuk masa akan datang dengan menentukan kegiatan-kegiatannya. Organizing merupakan pengaturan segala perangkat dan sumber daya sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan organisasi yang harmonis dan dikelola untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Actuating bermakna tindakan Pengurus dan anggota dalam rangkaian kegiatan untuk menjalankan roda organisasi Remaja Masjid dalam rangka mencapai tujuan. Controlling merupakan tindakan mengawasi, mengarahkan dan mengatur pelaksanaan kegiatan Remaja Masjid agar sesuai dengan program dan tujuan yang telah ditetapkan.

Management juga diartikan sebagai pimpinan lembaga / perusahaan. Sehingga kita dapat mengenal tingkat-tingkat (level) management yang biasa disebut dengan

